



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDI SUHARTO  
2. Jabatan : KEPALA DINAS  
3. NHK : 408198

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/13 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 117.500.000

1. MOTOR, HONDA NC11CF1C A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000  
2. MOTOR, HONDA H5C02R20M1M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000  
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA BAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 17.200.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 160.953

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 634.860.953

**III. HUTANG** Rp. 90.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 544.860.953

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYILVIANI  
2. Jabatan : BENDAHARA  
3. NHK : 902473

**II. DATA HARTA**

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>710.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 446 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000    |            |                    |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000 |            |                    |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>120.000.000</b> |
| 1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000                                      |            |                    |
| 2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1,5 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000                     |            |                    |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>20.500.000</b>  |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>---</b>         |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>  | <b>Rp.</b> | <b>16.891.098</b>  |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>---</b>         |
| <b>Sub Total</b>  | <b>Rp.</b> | <b>867.391.098</b> |
| <b>III. HUTANG</b>  | <b>Rp.</b> | <b>340.000.000</b> |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>  | <b>Rp.</b> | <b>527.391.098</b> |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDI SUHARTO  
2. Jabatan : KEPALA DINAS  
3. NHK : 408198

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/13 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 117.500.000

1. MOTOR, HONDA NC11CF1C A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000  
2. MOTOR, HONDA H5C02R20M1M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000  
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA BAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 17.200.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 160.953

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 634.860.953

**III. HUTANG** Rp. 90.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 544.860.953

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : PRISILLYA CASANDRA GOLDA
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 883391

**II. DATA HARTA**

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>330.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , Rp. 330.000.000 |            |                    |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>36.400.000</b>  |
| 1. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.400.000               |            |                    |
| 2. MOTOR, YAMAHA 2DP R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000                    |            |                    |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>25.400.000</b>  |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>   | <b>Rp.</b> | <b>15.532.225</b>  |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>Sub Total</b>   | <b>Rp.</b> | <b>407.332.225</b> |
| <b>III. HUTANG</b>   | <b>Rp.</b> | <b>175.484.557</b> |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>   | <b>Rp.</b> | <b>231.847.668</b> |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARLINA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 866620

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.140.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/467 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 520.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/213 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 150.000.000

1. MOBIL, NEW AVANZA VELOZ1.5 MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 18.500.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 49.194.682

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.357.694.682

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.357.694.682



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SABANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : MAYUNI MISLIH
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 864542

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 440.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 615 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 160.500.000

- MOTOR, SUZUKI SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOTOR, HONDA 01802N12L2 A/T / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER MOBIL PENUMPANG/JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.640.994

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 603.140.994

**III. HUTANG** Rp. 25.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 578.140.994

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.